

# MENYIBAK FAJAR NASIONALISME INDONESIA

Oleh: Dewi Yuliati\*

## 1. Pendahuluan

Nasionalisme dapat dipahami dari sudut pandang antropologi dan politik. Dalam dimensi antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup kesetiaan, komitmen, emosi, perasaan kepada bangsa dan negara, dan rasa memiliki bangsa dan negara itu. Dalam dimensi ini, Benedict Anderson mengatakan bahwa *nation* (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan beradulat yang dibayangkan (*imagined communities*). Komunitas politik itu dikatakan sebagai *imagined communities* sebab suatu komunitas tidak mungkin mengenal seluruh warganya, tidak mungkin saling bertemu, atau saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki gambaran atau bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan (**Benedict Anderson, 1983: 15**). Karena komitmen dan keinginan untuk mengikat diri dalam komunitas bangsa ini, dapat muncul kesetiaan yang tinggi pada *nation state* (negara kebangsaan). Bahkan, banyak warga suatu negara kebangsaan rela mengorbankan jiwa-raga untuk membela bangsa dan negara mereka. Senada dengan Benedict Anderson, Ernest Renan mengatakan bahwa unsur utama dalam pembentukan suatu bangsa adalah *le desir de'etre ensemble* (keinginan untuk bersatu). (**Taufik Abdullah, 2001: 49**). Abdoel Moeis, seorang tokoh Sarekat Islam, pada tahun 1917 telah mengartikan nasionalisme sebagai perasaan cinta kepada bangsa dan tanah air, yang diungkapkannya pada harian Sinar Djawa, 25 Oktober 1917 sebagai berikut:

Kalaoe kita mengingat akan nasib boeroeknja tanah air dan bangsa kita, jang beratoes tahoen selaloe berada dalam koengkoengan orang lain sadja, maka brdebarlah dada, timboellah soeatoe perasaan jang menggojang segala oerat saraf kita, perasaan kasihan kepada bangsa dan tanah air itoe (Sinar Djawa, 25 Oktober 1917).

---

\* Dewi Yuliati adalah dosen di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang. Makalah ini dipresentasikan dalam Sarasehan Sejarah Regional Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, di Hotel Pondok Tingal Magelang, 23 Mei 2009.

Dalam dimensi politik, nasionalisme merupakan ideologi yang meyakini bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, yaitu suatu negara yang penduduknya memiliki hak dan kewajiban sama serta mau mengikatkan dirinya dalam suatu negara (**Hans Kohn, 1984: 11; J.M. Romein, 1956: 75**). Demikian juga Soekarno, presiden pertama Indonesia, mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah konstruksi yang dihasilkan oleh sebuah visi yang diperjuangkan. Dalam pengertian politik ini, prinsip-prinsip utama dalam nasionalisme adalah kebebasan, kesatuan, keadilan, dan kepribadian yang menjadi orientasi kehidupan kolektif suatu kelompok untuk mencapai tujuan politik, yaitu negara nasional (**Sartono Kartodirdjo, 1993: 3**). Sebagai doktrin politik, nasionalisme merupakan basis serta pembenaran ideologis bagi setiap bangsa di dunia untuk mengorganisasi diri dalam entitas-entitas yang bebas atau otonom, dan entitas itu mengambil bentuk negara nasional yang merdeka (**Michael A. Riff, 2001: 194**).

Sebagai suatu konsep, nasionalisme digali dan dirumuskan pertama kali oleh orang-orang Eropa dalam ruang lingkup masyarakat Eropa. Doktrin nasionalisme berasal dari lingkungan masyarakat Jerman pada abad ke-18, dan dalam pergolakan luas di Eropa yang disebabkan oleh Revolusi Perancis. Banyak ahli berpendapat bahwa dari Eropa gaung nasionalisme meluas ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Akan tetapi, benarkah nasionalisme di Indonesia lahir karena pengaruh nasionalisme yang berkembang di Eropa? Bukankah kemunculan nasionalisme itu didasari oleh sistem budaya yang berupa emosi, perasaan, dan cita-cita dalam diri manusia sebagai bagian dari komunitas tertentu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dalam Artikel ini dikemukakan pembahasan tentang "fajar nasionalisme Indonesia", suatu masa yang masih remang-remang, pada saat kesadaran berbangsa dan bernegara belum mengkrystal secara nyata.

Untuk menyibak fajar nasionalisme Indonesia, diperlukan pemahaman terhadap situasi kolonial pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada saat itu ikatan tradisi dan diskriminasi masih sangat membatasi ruang gerak bangsa Indonesia, padahal di sisi lain sudah lahir golongan terpelajar bumiputera yang telah memiliki kesadaran untuk membebaskan diri dari belenggu tradisi dan kesadaran untuk mengadakan gerakan melawan pengingkaran terhadap identitas bangsa. Kartini, diakui sebagai pahlawan bangsa, karena mampu mengekspresikan ide-idenya

untuk mematahkan belenggu tradisi dan memperjuangkan kemajuan bangsa bumiputera.

Berdasarkan perspektif historis dan politis, pembentukan Boedi Oetomo, tanggal 20 Mei 1908, dipandang sebagai tonggak sejarah kelahiran kesadaran kebangsaan Indonesia. Akan tetapi di sisi lain, ada juga yang menilai Boedi Oetomo sebagai gerakan yang bersifat lokal karena skala kegiatannya hanya untuk rakyat Jawa dan Madura, sehingga perlu dicari momentum lain yang berskala nasional untuk ditetapkan sebagai tonggak sejarah kebangkitan nasional Indonesia (*Suara Merdeka, Minggu, 12 Mei 2008: 27*). Oleh karena itu, adalah perlu untuk menguak kembali kelahiran nilai-nilai nasionalisme Indonesia.

## **2. Kartini: Pelopor Pembebasan dari Belenggu Adat dan Tradisi**

### **2.1. Perlawanan Terhadap Poligami**

Setiap tanggal 21 April, di Indonesia selalu diadakan perayaan peringatan hari lahir Kartini, seorang perempuan Indonesia yang telah dinobatkan sebagai pahlawan bangsa. Kartini adalah seorang puteri dari R.M. Adipati Ario Sosroningrat, bupati Jepara, lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, kabupaten Jepara. Kartini adalah puteri dari istri ke dua ayahnya. Sampai dengan usia 12 tahun, Kartini masih diizinkan untuk bersekolah dan ke luar rumah oleh ayahnya. Akan tetapi, pada tahun 1892, ia harus menjalani pingitan, yang ketika itu merupakan adat Jawa yang diterapkan bagi kaum perempuan yang beranjak dewasa. Selama 4 tahun Kartini dikungkung dalam pingitan, dan setelah dibebaskan dari kungkungan itu, ia pun harus menghadapi keharusan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dikenalnya, yaitu R. Adipati Djojo Adiningrat, bupati Rembang yang sudah beristri. Sebenarnya, Kartini sangat menentang adat perkawinan semacam itu, tapi tiada daya, karena “menurut saja” adalah nilai yang harus ditaati oleh perempuan Jawa, dan menikah dengan pria yang tidak dikenal merupakan adat dan keharusan yang harus dijalani oleh gadis Jawa pada saat itu.

Kartini hidup dalam fase nasionalisme Indonesia yang paling awal. Rasa kebangsaan Kartini hanya diperjuangkannya sendiri, tanpa dukungan organisasi massa yang pada masa itu memang belum ada. Kesadaran akan nasib bangsanya dapat disimak melalui perlawanannya terhadap poligami yang pada saat itu

membudaya di kalangan bangsawan Jawa. Dalam suratnya kepada sahabatnya, Zeehandelaar, Kartini mencurahkan perasaannya sebagai berikut.

Sekali-sekali aku tiada dapat menaruh cinta. Jika akan bercinta, menurut pendapatku, haruslah ada rasa hormat dulu. Aku tiada dapat menghormati anak muda Jawa. Bagaimana aku dapat menghormati orang yang sudah kawin dan sudah jadi bapak, tetapi karena sudah puas beristrikan ibu anak-anaknya, membawa perempuan lain ke dalam rumahnya, perempuan yang dikawininya dengan sah menurut hukum Islam? Siapa yang tidak berbuat demikian? Dan mengapa pula tidak akan berbuat demikian? Hal itu bukan dosa, dan bukan celaan pula. Hukum Islam mengizinkan laki-laki menaruh empat orang perempuan. Meskipun orang mengatakan seribu kali bahwa beristri empat itu bukan dosa menurut hukum Islam, tetapi aku mengatakan bahwa itu dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya, dosalah menurut pendapatku. Betapakah azab sengsara yang harus diderita seorang perempuan, bila lakinya pulang ke rumah dengan perempuan lain dan perempuan itu harus diakuinya sebagai istri lakinya yang sah, dan harus diterimanya sebagai saingannya? Perempuan itu boleh disiksanya, disakitinya selama hidup sepuas hatinya, tetapi bila ia tidak hendak membebaskan perempuan itu kembali, perempuan itu hanya bisa menangis setinggi langit untuk meminta hak, tiada jua akan dapat.

Mengertikah engkau sekarang apakah sebabnya aku sangat benci akan perkawinan? Kerja yang serendah-rendahnya maulah aku mengerjakannya dengan besar hati dan dengan sungguh-sungguh, asalkan aku tidak usah kawin, dan aku bebas. Stella, tahukah engkau, betapa sedihnya hati. Hati ingin benar berbuat sesuatu, tetapi diriku merasa sungguh tidak berdaya untuk berbuat begitu.

Engkau bertanya, apakah asal mulanya aku terkurung dalam empat tembok tebal. Sangkamu tentu aku tinggal dalam terungku atau yang serupa itu. Bukan, Stella, penjaraku adalah rumah besar, berhalaman luas di sekelilingnya, tetapi di sekitar halaman itu ada tembok tinggi. Tembok inilah yang menjadi penjara kami. Bagaimana juga luasnya rumah dan pekarangan kami itu, bila harus senantiasa harus tinggal di sana, sesak juga rasanya. Teringat aku, betapa aku, karena putus asa dan sedih yang tiada terhingga, lalu menghempaskan badanku berulang-ulang pada pintu yang senantiasa tertutup itu, dan pada dinding batu bengis itu. Arah ke mana juga aku pergi, setiap kali putus juga jalanku oleh tembok batu atau pintu terkunci.

Seluruh dunia kami bumiputera tentu akan berubah juga. Masa perubahan sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi apabilakah? Itulah yang menjadi masalah. Datangnya waktu perubahan tidak dapat kami percepat. Kawan, di sini kami berkata, alangkah baiknya jika kami tidur dulu selama seratus tahun, dan ketika kami bangun kembali, barulah kami merasa sesuai dengan keadaan pada masa itu (**Cuplikan Surat Kartini Kepada Nona Zeehandelaar, 6 November 1899**).

( Dikutip dari R.A. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1949, terjemahan oleh: Armijn Pane).

Betapa pun Kartini meratapi dan menentang adat itu, kungkungan adat dan tradisi di lingkungan keluarganya lebih kuat. Ia harus menyerah. Pada tanggal 8 November 1903 Kartini harus menikah dengan bupati Rembang, R. Adipati Djojo Adiningrat. Pada tanggal 13 September 1904 puteranya lahir, dan empat hari kemudian pada 17 September 1904 Kartini wafat.

## **2.2. Keprihatinan Kartini Terhadap Konflik Karena Agama**

Pada masa kehidupan Kartini, konflik karena agama tampak telah menggejala dalam masyarakat Jawa. Kondisi ini dapat diketahui dari curahan hati Kartini dalam suratnya kepada Zeehandelaar sebagai berikut.

Agama itu maksudnya akan menurunkan rahmat kepada manusia, supaya ada silaturachim segala mahluk Allah. Kita sekalian bersaudara, bukan karena kita seibu sebapa, ialah ibu bapa kelahiran manusia, melainkan kita semuanya mahluk seorang Bapak, kepadaNya, yang bertahta di atas langit. Ya Tuhanku, ada kalanya aku berharap, alangkah baiknya jika tidak ada agama itu, karena agama itu, yang sebenarnya harus mempersatukan semua hamba Allah, sejak dari dahulu menjadi pangkal perselisihan dan perpecahan, menjadi sebab perkelahian, berbunuh-bunuhan yang sangat ngeri dan bengisnya. Orang yang seibu-sebapak berlawanan, karena berlainan cara mengabdikan kepada Tuhan Yang Esa itu. Orang yang berkasih-kasihan dengan amat sangatnya, dengan amat sedihnya bercerai-cerai, karena berlainan tempat menyeru kepada Tuhan, Tuhan yang itu juga; berdirilah tembok pembatas hati yang berkasih-kasihan. Benarkah agama itu restu bagi manusia? Tanyaku kerap kali kepada diriku sendiri, dengan bimbang hati. Agama harus menjaga kita dari berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu? **(Cuplikan surat Kartini kepada Nona Zeehandelaar, 6 November 1899)**

## **2.3. Memperjuangkan Pendidikan Bagi "Gadis Bangsa Bumiputera"**

Kartini juga memperjuangkan perbaikan kehidupan rakyat bumiputera melalui pendidikan perempuan. Di bawah ini adalah pemikiran Kartini tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan bumiputera.

Telah lama saya memikirkan perkara pendidikan, terutama dalam beberapa waktu yang terakhir ini. Pendidikan saya pandang sebagai kewajiban yang mulia dan suci. Saya pandang sebagai suatu kejahatan, jika saya melaksanakan usaha mendidik itu, tetapi saya belum mempunyai kecakapan yang penuh. Harusnya ternyata dulu, apakah saya sudah sanggup menjadi pendidik atau tidak. Menurut pendirian saya, pendidikan itu adalah pendidikan budi dan jiwa.

Rasa-rasanya kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya mencerdaskan pikiran saja. Ia harus juga bekerja mendidik budi meskipun tidak ada hukum yang mewajibkan berbuat demikian. Saya bertanya kepada diri saya sendiri: sanggupkah saya? Saya yang masih perlu juga dididik ini?

Dengan sepenuh hati saya membenarkan pikiran suami nyonya, yang tertulis dalam surat edaran tentang perkara pengajaran bagi gadis bumiputera: “Perempuan itu jadi soko guru peradaban!”. Bukan karena perempuan dipandang cakap untuk itu, melainkan karena saya sungguh yakin bahwa dari perempuan itu akan timbul pengaruh yang besar akibatnya, baik memburukkan maupun memperbaiki kehidupan. Dialah yang lebih dapat membantu memajukan kesusilaan manusia.

Dari perempuanlah pertama-tama manusia menerima didikannya. Di haribaannyalah anak itu belajar merasa, berpikir, dan berkata-kata. Makin lama makin tahulah saya, bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian hari. Betapakah ibu bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, jika mereka sendiri tidak berpendidikan?

Karena itulah saya sangat gembira akan maksud mulia untuk menyediakan pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis bumiputera. Sudah sejak lama saya maklum, bahwa itulah yang dapat mengubah kehidupan kami perempuan bumiputera yang sedih ini. Pengajaran bagi gadis-gadis itu bukan kepada perempuan saja akan mendatangkan rahmat, melainkan juga kepada seluruh masyarakat bumiputera (**Cuplikan surat Kartini kepada Nyonya Abendanon, 21 Januari 1901**)

(Dikutip dari R.A. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1949, terjemahan oleh: Armijn Pane).

Demikianlah Kartini, dengan tanpa kesadaran dan pemahaman tentang konsep nasionalisme, ia telah peduli dan memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap aspek-aspek kehidupan rakyat bumiputera yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.

### **3. Boedi Oetomo: Tonggak Sejarah Nasionalisme Indonesia**

#### **3.1. Pembentukan Boedi Oetomo**

Sampai dengan akhir abad ke-19, bangsa Eropa melihat orang bumiputera Indonesia masih “tidur nyenyak”, sedangkan bangsa kulit putih (Eropa) sudah melangkah jauh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuasaan bangsa Belanda atas bumi Indonesia pun sudah tidak dapat disangkal lagi. Perekrutan kepatuhan penduduk bumiputera (*Inlander*) kepada bangsa Eropa ditempuh antara lain dengan pemberlakuan sistem stratifikasi sosial dengan menempatkan orang bumiputera pada

lapisan masyarakat terendah. Kondisi ini menimbulkan kesombongan dalam diri bangsa Eropa, dengan menganggap orang bumiputera sebagai kaum rendahan yang layak dipinggirkan dan dijadikan obyek.

Ilustrasi tentang kesadaran rakyat bumiputera di Jawa akan harga dirinya yang sangat direndahkan oleh bangsa Eropa dapat disimak melalui kesaksian Goenawan Mangoenkoesoemo, salah seorang pendiri Boedi Oetomo, sebagai berikut.

Kaum bumiputera mempunyai nilai tidak lebih dari sebuah keset kaki atau seekor anjing yang dilempari batu oleh anak-anak. Di dalam kereta api, trem, di sekolah-sekolah, di jalan raya, di kantor-kantor, di perkebunan-perkebunan, bangsa bumiputera senantiasa dipandang rendah dengan cara sangat menghina, dipandang sebagai bangsa tanpa tenaga dan tanpa kekuatan. Bangsa bumiputera selalu menjadi obyek percobaan untuk pertanian, obyek pengamatan, dan sesuatu yang dianalisis dan dipelajari orang, serta sesuatu yang dapat ditulis untuk bahan-bahan ceramah ilmiah. (**Goenawan Mangoenkoesoemo, 1918: 9**).

Sistem penjajahan seperti itu mengandung benih-benih tenaga penentang dalam tubuhnya sendiri. Untuk kepentingannya, penjajahan melahirkan tenaga-tenaga yang pada saatnya akan menentang penjajahan sendiri. Boedi Oetomo (*Het Schone Streven/Usaha-usaha yang Mulia*) merupakan suatu bentuk tenaga penentang terhadap sistem kolonialisme Belanda.

Pada awal abad ke-20 pemerintah kolonial mulai mengusahakan kemajuan rakyat bumiputera, yang telah berpuluh tahun dieksploitasi melalui *cultuur stelsel* dan kemudian sistem liberal, yang telah menempatkan orang bumiputera sebagai tenaga kerja rendahan dengan gaji atau upah yang sangat rendah jika dibandingkan gaji para pekerja Eropa. Usaha untuk memajukan kehidupan rakyat bumiputera itu dilembagakan dalam politik etis yang mencakup terutama usaha untuk memajukan pengajaran. Namun demikian, masih banyak anak bangsa bumiputera tidak bisa bersekolah, karena orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Sebagai ilustrasi, pada awal abad ke-20 sebagian besar pekerja bumiputera di Jawa hanya menerima upah maksimal 1 gulden per hari, sedangkan biaya sekolah mencapai 10 gulden per bulan, dan masih ditambah 2,50

gulden untuk setiap mata pelajaran di luar paket yang telah ditentukan (**Semarangsche Ambachtschool, School voor Opzichter en Machinisten, Verslag Over Het Jaar 1913, hlm. 43.**)

Melihat kondisi ini, Wahidin Soediro Hoesodo, seorang dokter Jawa, berusaha keras untuk mengangkat derajat bangsanya dengan memperjuangkan pengadaan *studie fonds* (dana pendidikan) untuk anak-anak bangsa yang cerdas tetapi tidak mampu untuk memikul biaya pendidikan.

Pada tahun 1906-1907 dr. Wahidin mengunjungi berbagai tempat di pulau Jawa untuk memprogandakan gagasannya itu. Pada tahun 1907, Wahidin mengunjungi School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Weltevreden<sup>†</sup>, Batavia (Jakarta). Idenya yang bagus ini diterima secara antusias oleh siswa-siswa STOVIA. Soetomo dan rekannya Goenawan Mangoenkoeoemo, yang ketika itu masih menjadi siswa STOVIA, memproklamasikan pendirian Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pembentukan Boedi Oetomo dihadiri dan didukung oleh siswa-siswa sekolah lainnya, yaitu Sekolah Pertanian (Landbouw School) di Bogor, Sekolah Dokter Hewan (Veeartsenij School) di Bogor, Sekolah Kepala Negeri (Hoofden School) di Magelang dan Probolinggo, Sekolah Malam untuk Penduduk (Burgeravondschool) di Surabaya, Sekolah Pendidikan Guru Bumiputera di Bandung, Yogyakarta, dan Probolinggo. Mereka bersepakat untuk menyerahkan pimpinan Boedi Oetomo kepada dr. Wahidin Soediro Hoesodo pada kongresnya yang pertama di Yogyakarta.

Kongres pertama diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Kongres ini menerima secara baik rancangan anggaran dasar Boedi Oetomo dan memilih pengurus besar yang pertama, sebagai berikut: ketua: R.A. Tirtokoesoemo, bupati Karanganyar; wakil ketua: dr. Wahidin Soediro Hoesodo; sekretaris: M. Ng. Dwidjosewojo. Pada saat kongres yang pertama itu, Boedi Oetomo telah memiliki anggota sebanyak 1200 orang, 700 di antaranya adalah pejabat pemerintah dan kaum

---

<sup>†</sup> Sekarang: Jakarta Pusat.



swasta (**Soewarno, Sekretaris pertama Boedi Oetomo, dalam Soembangsih, Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908 – 20 Mei 1918**).

Soewardi Soerjaningrat menilai Wahidin Soediro Hoesodo sebagai bapak pergerakan rakyat, karena dari Wahidin lahirlah pikiran tentang kebangsaan yang mengkrystal dalam diri organisasi Boedi Oetomo. Soewardi Soerjaningrat juga mengatakan bahwa setelah Kongres I Boedi Oetomo pada tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta, mulailah hidup *de Indische Beweging* (Pergerakan Hindia), pergerakan rakyat, yang bapak sejatinya adalah Wahidin Soediro Hoesodo (**Soewardi Soerjaningrat dalam Nederlandsch Indië Oud en Nieuw 1916-1917**).

Pada awalnya, Boedi Oetomo memang hanya diperuntukkan bagi rakyat Jawa dan Madura, karena untuk mengajak suku-suku lain di Hindia Belanda, para pengurus Boedi Oetomo tidak memiliki keberanian mengingat usia mereka masih sangat muda, belum 20 tahun. Mereka belum mengetahui sejarah dan kebudayaan suku-suku lainnya, dan mereka juga menduga bahwa suku-suku lainnya itu memiliki cita-cita yang berbeda dari orang Jawa (**Goenawan Mangoenkoesoemo, 1918**).

Akan tetapi jika dilihat pada tujuannya, Boedi Oetomo telah memiliki tujuan yang berskala nasional, karena telah ditujukan bagi seluruh rakyat Hindia Belanda (Indonesia). Tujuannya itu dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.

Tujuan Boedi Oetomo adalah mengusahakan persatuan kaum Boemipoetera yang sedapat mungkin bersifat umum, sehingga akan tercapai Persatuan orang Jawa pada umumnya, dengan Boedi Oetomo hanya sebagai pelopor, yang tugas utamanya adalah untuk merancang cara-cara yang tepat untuk mencapai terwujudnya suatu pendidikan yang serasi bagi negara dan rakyat Hindia Belanda (**Pengumuman Afdeeling Bestuur Boedi Oetomo, 1908**).

Perhimpunan ini memberi kesempatan kepada setiap orang bumiputera yang ingin mengikuti pendidikan. Dalam surat edarannya, Soewarno, sekretaris pertama Boedi Oetomo mengatakan bahwa pengurus akan berusaha untuk menjadikan Boedi Oetomo sebagai Persaudaraan Nasional, yang tidak membedakan kesukuan, mazab, dan kepercayaan.

Dalam perjalanan sejarah pergerakan bangsa Indonesia, Boedi Oetomo telah menjadi *impetus* pertumbuhan dan perkembangan pergerakan rakyat yang berbentuk organisasi-organisasi modern. Oleh karena itu, hari kelahirannya, 20 Mei, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan pertama terjadi pada tahun 1938, setelah Boedi Oetomo berfusi dengan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) dalam Partai Indonesia Raya (Parindra). Peringatan yang ke dua dilaksanakan pada tahun 1948, ketika Indonesia sedang menghadapi agresi Belanda yang ke dua. Setelah itu, tanggal 20 Mei selalu diperingati dengan upacara dan perayaan.

### **3.2. Kristalisasi Kesadaran Nasional**

Bentuk-bentuk kesadaran Nasional Boedi Oetomo dapat disimak melalui usaha-usahanya dalam ruang lingkup budaya, ekonomi, dan politik.

Dalam lingkup budaya, sejak awal Boedi Oetomo telah menunjukkan kesadaran bahwa sudah saatnya untuk menggalang persatuan di kalangan orang Jawa, Madura, dan Sunda untuk mendidik rakyat bumiputera demi meningkatkan martabat dan harga diri bangsa. Melalui pendidikan, diharapkan rakyat bumiputera tidak lagi membiarkan diri mereka dicaci, dihina atau dipukuli oleh orang asing (**Goenawan Mangoekoesoemo, 1918**). Dalam rangka mengusahakan kesempatan bagi anak bangsa bumiputera untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah menengah, pada tanggal 23 Mei 1910, Boedi Oetomo mengajukan petisi kepada pemerintah kolonial agar memberikan mata pelajaran yang sama seperti sekolah-sekolah Eropa. Dengan demikian anak bumiputera dapat melanjutkan pendidikannya di STOVIA dan sekolah hukum serta sekolah-sekolah lanjutan atau menengah, yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar (**Akira Nagasumi, 1989: 136-137**). Dalam bidang budaya, Boedi Oetomo juga memperhatikan masalah-masalah kesusasteraan, seni tari, seni musik, dan harapan para anggotanya. (**Goenawan Mangoenkoesoemo, 1918**). Beberapa surat kabar yang menjadi media Boedi Oetomo adalah *Boedi Oetomo* (terbit pada 1 Juli 1910), dan *Goeroe Desa* (terbit pada September 1910, sejak 1916 menjadi tengah bulanan), dan *Darmo Kondo*. Semua itu merupakan bentuk kesadaran akan harga dan identitas diri bangsa.

Dalam lingkup ekonomi, Boedi Oetomo mengangkat masalah-masalah pertanian, industri kerajinan, dan masalah penyediaan lapangan pekerjaan. Melalui medium *Goeroe Desa*, Boedi Oetomo bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pedesaan. Surat kabar ini berisi nasehat-nasehat tentang penggarapan tanah, pengelolaan perdagangan, pemeliharaan ternak, unggas, dan lebah. Usaha Boedi Oetomo dalam lingkup ekonomi yang lain adalah pembentukan koperasi dan persatuan dagang, seperti yang diusahakan oleh Boedi Oetomo Cabang Klaten (**Akira Nagasumi, 1989: 139**).

Pada tahun 1915, Boedi Oetomo telah melangkah ke arena politik. Pada saat itu, pemerintah kolonial menggulirkan wacana tentang milisi bumiputera untuk Pertahanan Hindia (*Indië Weerbaar*). Kemunculan wacana ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap cita-cita ekspansi Jepang ke seluruh wilayah Asia. Boedi Oetomo menjadi pendukung wacana milisi bumiputera ini, dengan mengajukan syarat bahwa anggotanya dapat diberi posisi dalam *volksraad* (dewan rakyat) yang diresmikan pada awal tahun 1918.

Pada awal dasa warsa ke-4 abad ke-20, Boedi Oetomo telah menunjukkan secara tegas karakter politik dan nasional. Pada kongresnya dalam bulan April 1931 di Jakarta, Boedi Oetomo telah mengambil keputusan untuk membuka diri bagi semua golongan dan suku bangsa di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1931, di Surabaya lahir suatu organisasi "Persatuan Bangsa Indonesia" (PBI), di bawah pimpinan dr. Soetomo. Kristalisasi kesadaran kebangsaan berjalan lebih jauh lagi dengan pengambilan keputusan dalam kongres Boedi Oetomo di Surakarta pada tanggal 21 Mei 1935 untuk menggabungkan Boedi Oetomo, Persatuan Bangsa Indonesia, dan perkumpulan-perkumpulan kedaerahan yang lain. Pengambilan keputusan ini berarti bahwa karakter kedaerahan Boedi Oetomo telah berakhir, dan organisasi baru yang merupakan hasil fusi itu telah menunjukkan sosok nasional Indonesia, **Partai Indonesia Raya**.

#### 4. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pada Perempat terakhir abad ke-19, rasa kebangsaan (nasionalisme) telah diekspresikan oleh seorang gadis Jawa: Kartini. Ia berjuang dalam kesendirian, karena lingkungannya masih berpegang teguh pada adat yang sangat berlawanan dengan apa yang dipikirkan dan dicita-citakannya. Kekuatannya hanya berupa moral, karena ia belum memiliki sarana untuk mewujudkan pemikiran dan cita-citanya untuk meningkatkan martabat bangsanya.
2. Cita-cita dan pemikiran Kartini bukan bersumber dari dalam diri Kartini saja, tetapi juga berakar dari kondisi masyarakat bumiputera pada saat itu, yang telah menggelorakan semangat Kartini untuk berbuat sesuatu demi peningkatan kualitas hidup bangsa bumiputera. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kartini berbuat dalam fase penyadaran kebangsaan.
3. Kesadaran nasional pada perempat terakhir abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 adalah kesadaran untuk membebaskan diri dari tradisi (feodal dan kolonial), serta merupakan gerakan untuk melawan negasi (pengingkaran) terhadap identitas bangsa.
4. Meskipun pada awalnya identitas yang ditemukan masih bersifat etnosentrik, Pemikiran-pemikiran Kartini dan usaha-usaha Boedi Oetomo telah menjadi alat simbolis untuk membangun solidaritas kelompok, khususnya di kalangan kaum terpelajar.
5. Pada awalnya Boedi Oetomo belum dapat dipandang sebagai organisasi yang berskala nasional, tetapi sebenarnya ia telah menunjukkan kesadaran diri, nilai kebebasan, kesamaan, dan penemuan identitas diri yang merupakan prinsip-prinsip dalam nasionalisme.
6. Boedi Oetomo berjasa betul dalam meletakkan batu pertama untuk pembangunan kesadaran nasional Indonesia.
7. Fajar nasionalisme Indonesia telah memberi pelajaran kepada kita bahwa nasionalisme itu adalah subyek yang harus diusahakan, dibangun, dikerjakan, dan diberi makna baru sesuai dengan tuntutan zamannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Nasionalisme & Sejarah*, Bandung: Satya Historika, 2001.
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*, London: Thetford Press Limited, 1983.
- Blumberger, J.Th. Petrus, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indië*, Dordrecht-Holland: Foris Publications, 1987.
- Kartini, R.A. *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Jakarta: Balai Pustaka, 1949, terjemahan oleh: Armijn Pane.
- Kartodirdjo, Sartono, *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Kohn, Hans, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, Jakarta: PT Pembangunan dan Penerbit Erlangga, 1984.
- Mangoenkoesoemo, Goenawan, “De Geboorte van Boedi Oetomo” dalam *Soembangsih Gedenkboek Boedi Oetomo 1908*, 20 Mei 1918.
- Nagasumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: PT Grafiti Press & KITLV, 1989.
- Riff, Michael A., *Kamus Ideologi Politik Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ricklefs, M.C. *A History of Modern Indonesia*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: Macmillan Education LTD, 1981.
- Romein, J.M., *Aera Eropa Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*, Jakarta: NV Ganaco, 1956.
- Rukardi, *Kontroversi Kebangkitan Nasional dalam Suara Merdeka*, Minggu, 18 Mei 2008.
- Soeharto, Pitoet, dan Zainoel Ihsan, *Cahaya di Kegelapan Capita Selecta Kedua Boedi Oetomo & Sarekat Islam Pertumbuhannya dalam Dokumen Asli*, Jakarta: Jayasakti, 1981.

